

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi permasalahan yang dihadapi semua negara. Terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Peralunya, kini kemiskinan di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Permasalahan kemiskinan dapat ditandai dengan adanya tingkat pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan yang kurang, serta kesejahteraan masyarakat yang rendah dengan pendapatan yang kecil hingga menjadi ketimpangan. Ketimpangan kemiskinan dapat diukur melalui indeks kedalaman kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin di Indonesia penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Suatu proses yang saling keterkaitan dan berkesinambungan pada faktor-faktor yang meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam waktu jangka panjang dapat dikatakan sebagai pembangunan (Arsyad,2004).

Salah satu tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan penanggulangan ketimpangan pendapatan dengan pemerataan pendapatan yang diterima penduduk. Kesejahteraan penduduk menjadi tolak ukur utama tingkat kemiskinan artinya bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan maka menggambarkan tingkat kesejahteraan yang semakin memburuk, dan sebaliknya.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Tingkat kemiskinan digunakan sebagai ukuran agregat untuk mengukur tingkat kesejahteraan di suatu wilayah (Todaro & Smith, 2006). Menurut Ritonga (2003:1) menyatakan bahwa kemiskinan adalah dimana seseorang atau rumah tangga yang mengalami kondisi kehidupan dengan serba kekurangan kemudian tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan papan, sandang, pangan dan kebutuhan sosial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak.

Dari sisi jumlah maupun presentase tingkat kemiskinan di suatu daerah dengan daerah lain pastinya berbeda-beda. Pemerintah selalu berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk menurunkan angka kemiskinan terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Faktor demografi, ekonomi, pendidikan dan kebijakan daerah masing-masing merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Faktor lainnya yang diduga dalam mempengaruhi kemiskinan disuatu daerah yaitu pengangguran, pendidikan, pengeluaran pemerintah dan PDRB. Pemerintah selalu berupaya dalam penanggulangan kemiskinan termasuk bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena Jawa Timur termasuk salah satu provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia dan kemiskinan dapat diukur dari indeks kedalaman kemiskinan.

Oleh karena itu, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1. 1
Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2018

Provinsi	Presentase (%)	Jumlah penduduk miskin (Ribu Jiwa)
DKI Jakarta	3,57	372.26
Jawa Barat	7,45	3539.40
Jawa Tengah	11,32	3867.42
DI Yogyakarta	12,13	450.25
Jawa Timur	10,98	4292.15
Banten	5,24	668.74

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tabel 1.1 diperoleh tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa adalah DI Yogyakarta dengan presentase 12,13. Diikuti dengan posisi kedua Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur di posisi ketiga dengan presentase 10,98. Sedangkan jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa adalah di Jawa Timur sebesar 4292 ribu jiwa.

Tabel 1. 2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2018

Provinsi	Presentase (%)	Jumlah penduduk miskin (Ribu Jiwa)
DKI Jakarta	0,50	372.26
Jawa Barat	1,13	3539.40
Jawa Tengah	1,63	3867.42
DI Yogyakarta	1,65	450.25
Jawa Timur	2,07	4292.15
Banten	0,91	668.74

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.2 menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh DI Yogyakarta berada di posisi kedua. Dan tingkat kedalaman kemiskinan posisi ketiga diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah.

Tingginya kemiskinan di Jawa Timur dapat dikatakan bahwa masih belum optimalnya kesejahteraan masyarakat dalam segi pembangunan. Gemmel, (1992) dan Sen, (2002) melihat segi kemiskinan dari perspektif luas yaitu rendahnya pendapatan, tidak tersedianya akses pengetahuan, sumber daya, layanan sosial, kesehatan yang memadai, serta ketersaingan dalam hal pembangunan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Unsur-unsur tersebut dapat menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat sehingga mengakibatkan kemiskinan.

Tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan memiliki korelasi. Tingginya tingkat kemiskinan diiringi dengan tingginya tingkat pengangguran. Secara ekonomi, pengangguran mempengaruhi daya saing dan daya beli masyarakat sehingga secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan (Rahmawati,2016). Kondisi menganggur menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat karena dengan mengangur pendapatan masyarakat rendah sehingga daya beli masyarakat juga rendah sehingga mereka memiliki keterbasan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga terjebak dalam kemiskinan yang menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Hal ini menggambarkan pengaruhnya tingkat pengangguran terhadap kemiskinan.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan. Padahal pendidikan di suatu wilayah menjadi peranan penting dalam mengurangi tingginya kemiskinan.

Tinggi rendahnya pendidikan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pendidikan merupakan salah satu cara dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan serta sebagai dasar bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Bank Dunia, 2016).

Provinsi Jawa Timur merupakan Kawasan Industri dimana PDRB Kota Surabaya memiliki jumlah tertinggi. Hal tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya tinggi karena Ibu Kota Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya yang semua kegiatan bidang perekonomiannya berpusat di Kota Surabaya (Nugroho, 2015). Dengan PDRB yang tinggi maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Jika kesejahteraan masyarakat tinggi maka jumlah penduduk miskin makin berkurang. Tetapi tingginya PDRB belum tentu berhasil dalam mengurangi kemiskinan karena masih terdapat masyarakat yang belum merasakan hasil kesejahteraan. PDRB hanya sebagai gambaran umum dari kesejahteraan masyarakat (Alhudori, 2017).

Maka dari itu faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur perlu diketahui untuk digunakan sebagai acuan dalam membantu membuat atau menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur, maka penulis mengambil judul penelitian **“Analisis Determinan Tingkat Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2018 ”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
4. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, manfaat dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh pengangguran terbuka,

PDRB, belanja modal, dan pendidikan terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

2. Bagi Pemerintah Daerah, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur sehingga dapat mengurangi masalah kemiskinan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdapat 5 bab. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada Bab II berisi tentang kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian sebelumnya sehingga dapat digunakan untuk referensi yang akan diteliti pada penelitian ini.

3. BAB III. METODE PENELITIAN

Pada Bab III menguraikan tentang jenis dan cara pengumpulan data yang digunakan, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

4. BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV menjelaskan mengenai hasil analisis yang dihasilkan dari penelitian dan pembahasan yang akan ditelaah lebih lanjut dari hasil analisis yang diperoleh.

5. BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang diperoleh kemudian menjawab rumusan masalah pada implikasi.

